



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : SP DIPA- 135.04.2.692047/2026**



DS:3097-3444-1813-7541

**Revisi ke 01**

Tanggal : 27 Desember 2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(04)	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(692047)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR
Sebesar	:	Rp. 3.661.359.000	( TIGA MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH SATU JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	3.661.359.000
135.04.BF.7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp.	3.661.359.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	-	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	3.661.359.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SURABAYA II	(135) Rp.	3.661.359.000
---------------------	-----------	---------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025

A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.

LUKY ALFIRMAN  
NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**  
**NOMOR : DIPA- 135.04.2.692047/2026**  
**I A. INFORMASI KINERJA**



Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
 Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
 Provinsi : (05) JAWA TIMUR  
 Kode/Nama Satker : (692047) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Halaman : I A. 1

Program	:	135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			3.661.359.000
Kegiatan	:	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			3.661.359.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4,00	layanan	1.244.087.000
Rincian Output	:	01	BAH.001 Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	4.00	layanan	1.244.087.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga	1,00	Perkara	45.936.000
Rincian Output	:	01	BCB.001 Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	1.00	Perkara	45.936.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	24,00	Lembaga	2.300.840.000
Rincian Output	:	01	BIC.001 Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah	24.00	Lembaga	2.300.840.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	70.496.000
Rincian Output	:	01	FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah	1.00	Laporan	70.496.000

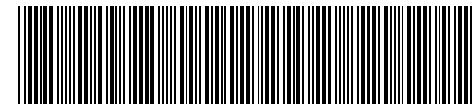
Jakarta, 01 Desember 2025  
 Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
 WIDODO

## DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.04.2.692047/2026



DS:3097-3444-1813-7541

## I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
 Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
 Provinsi : (05) JAWA TIMUR  
 Kode/Nama Satker : (692047) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Halaman : I B. 1

				Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	3.661.359.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0 Rp. 0
2. PNBP	Rp.		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0	d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0	e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :			f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0

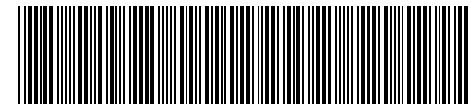
(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register	PAGU TAHUNINI  1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah	RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN			DANA PENDAMPING		
			1) PP	2) PL	3) RK	4) LC	5) -	
Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10

## DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.04.2.692047/2026



DS:3097-3444-1813-7541

## II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM

Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Provinsi : (05) JAWA TIMUR

Kode/Nama Satker : (692047) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1

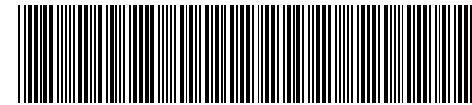
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692047	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR		-	3.661.359	-	-	-	3.661.359	
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		-	3.661.359	-	-	-	3.661.359	
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		-	3.661.359	-	-	-	3.661.359	
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)		-	1.244.087	-	-	-	1.244.087	05 . 51
04	PNBP		-	1.244.087	-	-	-	1.244.087	135@
7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)		-	45.936	-	-	-	45.936	05 . 51
04	PNBP		-	45.936	-	-	-	45.936	135@
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)		-	2.300.840	-	-	-	2.300.840	05 . 51
04	PNBP		-	2.300.840	-	-	-	2.300.840	135@
7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)		-	70.496	-	-	-	70.496	05 . 51

## DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.04.2.692047/2026



DS:3097-3444-1813-7541

## II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM

Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Provinsi : (05) JAWA TIMUR

Kode/Nama Satker : (692047) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	PNBP	-	70.496	-	-	-	70.496	135@	
	JUMLAH	-	3.661.359	-	-	-	3.661.359		

Jakarta, 01 Desember 2025  
 Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
 WIDODO

## DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.04.2.692047/2026



DS:3097-3444-1813-7541

## III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM

Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Provinsi : (05) JAWA TIMUR

Kode/Nama Satker : (692047) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692047	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	29.721	860.632	33.955	213.665	748.215	104.064	106.558	708.215	49.267	807.066	3.661.359
		BELANJA BARANG	0	0	29.721	860.632	33.955	213.665	748.215	104.064	106.558	708.215	49.267	807.066	3.661.359
135.04.BF.7110		Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	0	29.721	860.632	33.955	213.665	748.215	104.064	106.558	708.215	49.267	807.066	3.661.359
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	29.721	860.632	33.955	213.665	748.215	104.064	106.558	708.215	49.267	807.066	3.661.359

Jakarta, 01 Desember 2025

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

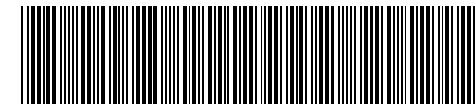
ttd.  
WIDODO

## DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.04.2.692047/2026

## IV A. B L O K I R



DS:3097-3444-1813-7541

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM

Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Provinsi : [05] JAWA TIMUR

Kode dan Nama Satker : [692047] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Halaman : IV.A. 1

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
692047	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR</b> Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 1.568.112 52 Belanja Barang Rp. 1.568.112		Halaman IV.A DIPA (Blokir) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 130.479 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	
135.04.BF	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.474 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	
7110	<b>Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah</b>		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya <b>7110.BAH</b> <b>Pelayanan Publik Lainnya</b> 521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.503 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.600 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.500 Halaman IV.A DIPA (Blokir) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522141 Belanja Sewa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.211 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.610 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 158.400	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 7110.BCB <b>Perkara Hukum Lembaga</b> 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.406 Halaman IV.A DIPA (Blokir) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 672 Halaman IV.A DIPA (Blokir) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya <b>7110.BIC</b> <b>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b> 521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 41.590 Halaman IV.A DIPA (Blokir) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 974.700 Halaman IV.A DIPA (Blokir) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**  
**NOMOR : DIPA- 135.04.2.692047/2026**  
**IV A. B L O K I R**



DS:3097-3444-1813-7541

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM  
 Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
 Provinsi : [05] JAWA TIMUR  
 Kode dan Nama Satker : [692047] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Halaman : IV.A. 2  
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7110.FAE	<p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.652 Halaman IV.A DIPA (Blokir)</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 64.233 Halaman IV.A DIPA (Blokir)</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p><b>Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan</b></p> <p>521211 Belanja Bahan(PNBP)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.360 Halaman IV.A DIPA (Blokir)</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 23.722 Halaman IV.A DIPA (Blokir)</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p>		

Jakarta, 01 Desember 2025  
 Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
 WIDODO

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**  
**NOMOR : DIPA- 135.04.2.692047/2026**  
**IV B. C A T A T A N**



Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM

Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Provinsi : [05] JAWA TIMUR

Kode dan Nama Satker : [692047] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
WIDODO